

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Jombang

Muhamad Satria Agung Wijaya.

Magister Kebijakan Publik, Departemen Administrasi, FISIP UNAIR.

Abstract

One of the problems that surfaced in the local development planning process at this time was had means community participation by government as a form of empowerment, but it was only meant as a way to get over the legality of the government's development policies. It can be seen from far Musrenbang, where the main issue is how difficult it is to make sure the public proposal to be accommodated in the budget. In addition to the Local Government and Parliament often escape socialized society upon which proposals are accommodated in the budget or not. Presumably aspect of accountability is not a top priority in local development planning process in Indonesia. This study seeks to measure how much influence public participation (contains 5 variable) in the local development planning accountability, which is the locus of Jombang. The sample of respondents is a participant Musrenbang Jombang district level numbering 80 people, followed by interviews with several informants to dig deeper once and to confirm the results of the questionnaire. The result, there are positive influence on the community participation and accountability of local development planning in Jombang, with a correlation coefficient of 0.823. Variable of community participation which has strong influence is Deciding Together, Acting Together and Supporting. Accountability aspects measured include Legal and Honest Accountability, Program Accountability, Procces Accountability and Policy Accountability.

Key Words: Public Participation, Accountability, Development Planning.

Pendahuluan

Perjalanan perencanaan pembangunan dengan sistem *bottom up planning* di Indonesia hingga saat ini masih menyisakan berbagai permasalahan. Wawan Sobari (2007) menemukan beberapa kelemahan dari pelaksanaan Musrenbang, yaitu pertama, partisipasi dalam konteks pelaksanaan Musrenbang ternyata lebih dipahami sebagai kontribusi masyarakat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan. Bukan secara komprehensif untuk mempromosikan demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembiayaan pembangunan, sehingga pemerintah daerah dan DPRD belum bisa menjamin bahwa seluruh usul masyarakat dalam Musrenbang akan direalisasikan dalam APBD. Kedua, dominasi penggunaan metode-metode formal dan teknokratik. Hal tersebut menunjukkan konsep partisipasi masyarakat sampai saat ini masih dipahami sebagai bentuk mobilisasi masyarakat untuk mengikuti program tertentu. Masyarakat hanya dilibatkan dalam tahap penghimpunan usulan, tanpa dilibatkan penuh dalam tahap perencanaan selanjutnya. Padahal kegiatan tersebut tidak kalah pentingnya.

Bastian (2009) menyebutkan bahwa kegiatan pembangunan mensyaratkan partisipasi masyarakat, keikutsertaan masyarakat akan menguatkan akuntabilitas dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan kata lain partisipasi masyarakat akan berguna dalam mewujudkan sebuah akuntabilitas publik oleh pemerintah. Selain itu konsep Partisipasi dan Akuntabilitas juga menjadi kunci mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Edy Marbyanto (2008) bahwa aspek akuntabilitas dalam proses perencanaan pembangunan yang partisipatif di Indonesia kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah pada umumnya, hal ini terlihat dari tidak tersedianya informasi mengenai hasil Musrenbang, pendekatan yang digunakan seringkali berorientasi “proyek”, serta sering tidak sesuai dengan prioritas pembangunan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat.

Berbagai permasalahan yang menyelimuti pelaksanaan Musrenbang tersebut, dikawatirkan dapat menggerus partisipasi masyarakat dan mengurangi akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah itu sendiri. Karena bagaimanapun juga jika perencanaan pembangunan daerah tidak didukung oleh masyarakat,

maka akan menjadikannya kurang *legiti-mate*. Padahal partisipasi masyarakat menjadi syarat mutlak untuk terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel. Penelitian ini berusaha mengukur seberapa besar pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah dengan mengambil focus di kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Manfaatnya adalah sebagai kajian yang memberikan kontribusi positif dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah.

F.E. Kast dan Jim Rosenzweig dalam Inu Kencana (1999) mengatakan bahwa perencanaan adalah suatu kegiatan yang terintegrasi, yang bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas keseluruhan usaha, sebagai suatu sistem sesuai dengan tujuan organisasi yang bersangkutan. Fungsi perencanaan antara lain untuk menetapkan arah dan strategi serta titik awal kegiatan supaya dapat membimbing dan memperoleh ukuran yang dipergunakan dalam pengawasan agar tercegah dari pemborosan waktu dan faktor produksi lainnya. Alexander Abe dalam Purnamasari (2008:46) mengemukakan pengertian Perencanaan partisipatif, adalah perencanaan yang didalam tujuannya melibatkan masyarakat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung) tujuan dan cara adalah sebuah kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat tetapi tidak melibatkan rakyat, maka akan sangat sulit dipastikan akan berpihak pada rakyat.

Mardikanto (2012:81) mengemukakan bahwa Partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Soemarto (2009) mendefinisikan partisipasi masyarakat adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Wilcox (1988) dalam Mardikanto (2013) mengemukakan 5 (lima) tingkatan partisipasi masyarakat, yaitu: Memberikan informasi (*Information*); Konsultasi, (*Consultation*); Pengambilan Keputusan bersama (*Deciding Together*); Bertindak bersama (*Acting Together*); dan

Memberikan dukungan (*Supporting*). Menurut Mardiasmo dalam Bastian (2009) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Caiden (1988) dalam Haning (2003) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban untuk memberikan jawaban atas suatu tanggungjawab, melaporkan, menjelaskan, memberikan alasan, merespon, dan memikul suatu tanggung jawab dan memberi diri untuk dinilai dan tunduk kepada suatu badan eksternal atau suatu penghakiman. Ellwood (1993) dalam Bastian (2009) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode Kombinasi (*Mixed Method*) yang menggunakan desain *Sequential Explanatory*. Dimana pengumpulan data primer dilakukan melalui angket, kemudian dilanjutkan wawancara untuk mengkonfirmasi hasil angket sekaligus menggali informasi penting lain yang ada. Sugiyono (2011 : 404), mendefinisikan penelitian kombinasi sebagai suatu metode penelitian yang meng-kombinasikan atau menghubungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif yang digunakan bersama dalam sebuah kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan obyektif.

Populasi dalam penelitian ini seluruh peserta Musrenbang Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang berjumlah 100, sampel diambil sejumlah 80 orang, yang terdiri dari unsur Kepala Desa/ Lurah/ perangkat Desa, LPMD, BPD, Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Perempuan. Sementara pengumpulan data dengan wawancara dilakukan pada beberapa informan yaitu masing masing dari unsure Tokoh Masyarakat, Unsur Kecamatan, Unsur

Desa (Lurah/ Kades/ Peragkat Desa/LPMD/BPD), Unsur Bappeda, dan anggota DPRD. Teknik analisa yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu regresi linier berganda. Dimana X_1 : Memberi Informasi; X_2 : Konsultasi; X_3 : Memutuskan Bersama; X_4 : Bertindak Bersama; X_5 : Memberi Dukungan. Sedangkan Y : Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Uji Hipotesa menggunakan SPSS, terkait Uji F, menunjukkan bahwa F hitung adalah sebesar 68,844. Nilai tersebut lebih besar dari nilai F tabel, dengan Df (N_1) = 5 dan Df (N_2) = 74, dimana diketahui F tabel = 2,34. Sehingga Partisipasi Masyarakat (variabel X secara besamaan) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Jombang. Atau variabel-variabel X secara besamaan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Hasil perhitungan statistik juga menunjukkan bahwa koefisien korelasi model tersebut adalah **0,823**. Hal ini berarti adanya kenaikan variabel-variabel Partisipasi Masyarakat (X) secara bersama-sama sebesar 1% akan diikuti kenaikan Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah (Y) sebesar 0,823%.

Terkait Uji t, atau pengaruh tiap-tiap variabel X terhadap Y, dengan menggunakan SPSS menunjukkan hasil bahwa diketahui bahwa nilai t hitung untuk X_1 = 1,197; X_2 = 1,458; X_3 = 2,256; X_4 = 3,519; dan X_5 = 5,094. Kemudian dengan melihat Df residual = 74, maka dapat diketahui bahwa nilai t tabel adalah **1,66571**. Lalu dengan membandingkan nilai t hitung masing-masing variabel X tersebut dengan nilai t tabel yang ada, dapat diambil kesimpulan bahwa

1. Variabel **X1 Memberi Informasi**, Tidak terdapat Hubungan atau Pengaruh dengan Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Jombang (Y), namun tidak signifikan.
2. Variabel **X2 Konsultasi**, Tidak ter-

dapat Hubungan atau Pengaruh dengan Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Jombang (Y), namun tidak signifikan.

3. Variabel **X3 Memutuskan Bersama**, berpengaruh positif terhadap akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Jombang, dan signifikan (kuat).
4. Variabel **X4 Bertindak Bersama**, berpengaruh positif terhadap akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Jombang, dan signifikan (kuat).
5. Variabel **X5 Memberikan Dukungan**, berpengaruh positif terhadap akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Jombang, dan signifikan (kuat).

Sehingga dari kesimpulan di atas, terlihat bahwasannya variabel Partisipasi Masyarakat yang berpengaruh kuat terhadap Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Variabel Memutuskan bersama (X_3), Variabel Bertindak Bersama (X_4) dan Variabel Memberikan Dukungan (X_5). Sedangkan Variabel Memberi Informasi (X_1) dan Variabel Konsultasi (X_2) tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah (Y).

Dari Hasil penilaian kuestioner Partisipasi Masyarakat (Variabel X) menunjukkan skor **5165** atau jika dipersentase menunjukkan angka **71,7 %**. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan skor tersebut Partisipasi Masyarakat berada pada kategori **Tinggi**, yaitu antara skor **4897 – 6048**.

Dari Hasil penilaian kuestioner Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah (Variabel Y) menunjukkan skor **4107** atau jika dipersentase menunjukkan angka **68,5 %**. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan skor tersebut Akuntabilitas Perencanaan pembangunan berada pada kategori **Tinggi**, yaitu antara skor **4081 – 5040**. Melalui Wawancara diketahui bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan berupa menghadiri rapat, berkonsultasi, pengambilan keputusan, pengawasan serta bentuk partisipasi mendukung kebijakan.

Melalui Wawancara pula diketahui bahwa telah terpenuhinya sebagian besar indikator akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas program dan akuntabilitas proses. Hal itu terbukti dengan adanya itikad baik atau komitmen, dari pemerintah daerah dan DPRD untuk lebih akuntabel pada masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah melalui program PID (Pagu Indikatif Desa) dengan jargon 500 juta per desa pertahun. Hal ini pula yang turut mendongkrak naiknya persentase kehadiran masyarakat pada Musrenbang tahun 2014 di kecamatan Jombang., selain ditambahnya kuota perwakilan per desa menjadi 6 orang.

Simpulan

1. Partisipasi Masyarakat (variabel X secara besamaan) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Koefisien korelasinya mencapai 0,823.
2. Diantara variabel Partisipasi Masyarakat yang berpengaruh kuat terhadap Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Variabel Memutuskan bersama (X3), Variabel Bertindak Bersama (X4) dan Variabel Memberikan Dukungan (X5). Sedangkan Variabel Memberi Informasi (X1) dan Variabel Konsultasi (X2) tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah (Y).
3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dapat dikatakan baik atau tinggi.
4. Tingkat Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Jombang juga dapat dikatakan baik atau tinggi.

Saran

1. Pembangunan daerah perlu diarahkan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat, melalui kegiatan memutuskan rencana pembangunan secara bersama; membangun akses partisipasi, terutama dalam kegiatan pembangunan

yang mengajak masyarakat; serta memberi ruang bagi kontrol masyarakat atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, termasuk memberikan kesempatan masyarakat mendukung setiap kebijakan pembangunan.

2. Pemerintah Kabupaten Jombang dan DPRD Kabupaten Jombang perlu menguatkan komitmen dalam mengakomodir usulan kebutuhan masyarakat dengan menambah alokasi anggaran perdesa melalui program Pagu Indikatif Desa (PID), karena terbukti dapat meningkatkan antusiasme masyarakat mengikuti Musrenbang.
3. Pemerintah Kabupaten Jombang dan DPRD Kabupaten Jombang perlu membentuk Peraturan Daerah (Perda) Perencanaan Pembangunan Daerah, guna memastikan keberlanjutan dan akuntabilitas program-program pembangunan yang partisipatif.
4. Pemerintah Daerah kiranya perlu menyiapkan aparatur desa yang handal dan berkompeten dalam pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan diklat, menyeleksi personil (selektif dalam penempatan Sekdes), melakukan pendampingan serta melaksanakan audit internal secara berkala yang berfungsi untuk pembinaan, sebagai persiapan menerima dana program PID.

Daftar Pustaka

- Bastian, Indra. 2009. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Salemba Empat : Jakarta.
- Haning, Jeremi. 2003. *Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Otonom : Langkah apa yang diambil*. Jurnal Kybernan.
- Mardikanto, Totok., Poerwoko Soebianto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung
- Purnamasari, Irma. 2008. *Study Partisi-*

- pasi Masyarakat dalam Perencanaan Pem-bangunan di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi*. Tesis. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sobari, Wawan. 2007. *Peningkatan Partisipasi Publik di Era Otonomi Daerah-Masih Sebatas Instrumen*. Artikel pada berita Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah (YIPD) : Jakarta. Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*. Alfabeta : Bandung
- Sumarto, Hetifah Sj. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta : Jakarta.